

Peran Patroli Perintis Presisi dalam Mencegah Terjadinya Tawuran di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya

Wahyu Agung Jagat Karana¹, Surya Nita², Chairul Muriman Setyabudi³

¹Sekolah Kajian Strategik dan Global UI, e-mail: wahyuagungj99@gmail.com

²Sekolah Kajian Strategik dan Global UI, e-mail: suryanita.sksgui@gmail.com

³Sekolah Kajian Strategik dan Global UI, e-mail: cak_iir1966@yahoo.com

Histori Naskah

Diserahkan:
25-09-2024

Direvisi:
15-10-2024

Diterima:
21-10-2024

ABSTRACT

The phenomenon of brawls in the DKI Jakarta area is increasing due to environmental, economic, and population density factors in the region. The literature references that form the main basis of this research are situational crime prevention theory, iceberg theory, social conflict theory, youth identity theory, as well as the concepts of community policing, and precision inspector patrols. This research uses qualitative methods with data collection techniques of interviews and document studies. The results showed that the role of the Precision Inspector Patrol in preventing fighting in the jurisdiction of Polda Metro Jaya is to ensure that patrols and general guards can run smoothly, be responsible for each assignment, training, and supervision of patrol teams in other units, be the front guard to carry out various preventive and responsive efforts, conduct routine patrols, respond to reports from the public, and maintain the situation in the jurisdiction of Polda Metro Jaya to remain conducive and under control. Through this role, the strategies that can be carried out by the Metro Jaya Police Precision Inspector Patrol Team in preventing fighting crimes are preemptive, preventive, and repressive strategies that are investigative in nature. The community policing policy model in an effort to maximise the implementation of the Precision Pioneer Patrol to prevent horizontal conflicts in the Polda Metro Jaya jurisdiction can be realised through several management stages which include communication and synergy, cooperation, handling, and performance evaluation. Thanks to this, the Precision Pioneer Patrol has been able to reduce the number of horizontal conflicts that occur in the Polda Metro Jaya jurisdiction. The suggestions are for the Precision Pioneer Patrol Team to increase the frequency of patrols at night in the red and yellow zones, for future researchers to apply GIS as an early detection map of conflict-prone areas, and for cooperation partners to expand the scope of programme implementation P2TP2A Unit, PPA Unit, and FKDM to provide an understanding of the importance of Precision Pioneer Patrol in preventing horizontal conflicts.

Keywords : Precision Pioneer Patrol, Polda Metro Jaya, Brawl

ABSTRAK

Fenomena tawuran di wilayah DKI Jakarta semakin meningkat yang disebabkan oleh faktor lingkungan, ekonomi, dan kepadatan jumlah penduduk di wilayah tersebut. Referensi pustaka yang menjadi dasar utama dalam penelitian ini adalah teori pencegahan kejahatan situasional, teori gunung es, teori konflik sosial, teori identitas remaja, serta konsep pemolisian masyarakat, dan patroli inspektur presisi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Patroli Inspektur Presisi dalam mencegah terjadinya berkelahi di wilayah hukum Polda Metro Jaya adalah memastikan bahwa patroli dan penjagaan umum dapat berjalan dengan lancar, bertanggung jawab atas setiap penugasan, pelatihan, dan pengawasan pada tim-tim patroli di unit lain, menjadi garda depan untuk melakukan berbagai upaya preventif dan responsif, melakukan patroli secara rutin, memberikan respon terhadap laporan dari masyarakat, serta menjaga situasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya agar tetap kondusif dan terkendali. Melalui peran tersebut, strategi yang dapat dilakukan oleh Tim Patroli Inspektur Presisi Polda Metro Jaya dalam mencegah terjadinya tindakan

kriminalitas berkelahi, yaitu strategi preemtif, preventif, dan represif yang bersifat investigatif. Model kebijakan pemolisian masyarakat dalam upaya memaksimalkan pelaksanaan Patroli Perintis Presisi untuk mencegah terjadinya konflik horisontal di wilayah hukum Polda Metro Jaya dapat direalisasikan melalui beberapa tahapan pengelolaan yang mencakup komunikasi dan sinergitas, kerja sama, penanganan, serta evaluasi kinerja. Berkat hal tersebut, Patroli Perintis Presisi telah mampu menurunkan angka konflik horisontal yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Adapun saran yang disarankan yaitu bagi Tim Patroli Perintis Presisi bisa meningkatkan frekuensi patroli pada malam hari di zona merah dan kuning, bagi peneliti berikutnya dapat menerapkan GIS sebagai deteksi dini peta kawasan rawan konflik, dan bagi mitra kerja sama dapat memperluas cakupan pelaksanaan program Unit P2TP2A, Unit PPA, dan FKDM untuk memberikan pemahaman pentingnya Patroli Perintis Presisi dalam mencegah terjadinya konflik horisontal.

Kata Kunci : Patroli Perintis Presisi, Polda Metro Jaya, Tawuran

Corresponding Author : Surya Nita, Kajian Ilmu Kepolisian, Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia, e-mail: suryanita.sksgui@gmail.com

PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah lembaga penegak hukum nasional dan kepolisian negara di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden Republik Indonesia sebagaimana dikutip pada sumber (Haerani, 2021). Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 5, Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri memiliki peranan sebagai penguat hukum yang bertujuan menjaga keamanan, ketertiban, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat. Polri bertugas melakukan penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini mencakup beragam kegiatan seperti patroli, investigasi kasus pidana, memberikan perlindungan kepada warga, serta berinteraksi dengan masyarakat untuk memahami dan menyelesaikan masalah yang muncul. Dengan demikian, Polri berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial dan memberikan perlindungan kepada masyarakat secara menyeluruh sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan aturan yang berlaku (Burhanuddin, 2017).

Isu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) juga mencakup upaya dalam menangani konflik yang seringkali berkembang menjadi sengketa di tengah masyarakat yang dapat menghasilkan pertikaian fisik yang dikenal sebagai tawuran (Ichwanul, 2022). Tawuran merupakan bentukan dari konflik yang eskalatif di mana kelompok-kelompok individu terlibat dalam perkelahian atau kekerasan fisik di tempat umum. Hal ini seringkali melibatkan remaja atau pemuda dan dapat menciptakan kerugian baik dalam hal kesehatan fisik maupun stabilitas sosial di lingkungan sekitar (Basri, 2015). Fenomena tawuran saat ini cukup meramalkan terjadi di beragam wilayah di Indonesia di mana DKI Jakarta menjadi provinsi di Indonesia yang menempati urutan keempat tertinggi sebagai wilayah yang seringkali terjadi tawuran (BPS, 2023). DKI Jakarta sebagai ibukota Indonesia merupakan pusat kegiatan ekonomi, politik, dan sosial yang dinamis. Namun, dibalik kegemilangan kota ini terdapat masalah yang mengganggu di mana salah satunya adalah tingginya tingkat tawuran antar kelompok. Setiap tahun, berbagai wilayah di Jakarta dilanda konflik fisik antara kelompok-kelompok yang terkadang memiliki latar belakang sosial, budaya, atau politik yang berbeda (Naufal, 2019).

Fenomena tawuran ini dapat terjadi karena dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang memicu pertikaian berasal dari dalam diri seseorang, termasuk aspek psikologis individu akibat internalisasi diri yang keliru saat menanggapi nilai-nilai lingkungan. Faktor internal penyebab pertikaian antara lain memiliki krisis identitas, kontrol diri cenderung lemah, dan sulit beradaptasi dengan lingkungan kompleks sehingga kerap bertindak gegabah dalam menyelesaikan masalah. Selain itu, faktor eksternal juga memicu terjadinya pertikaian. Faktor eksternal berasal dari lingkungan sosial di luar kondisi individu, di antaranya kurangnya dukungan komunikasi dan perhatian dari keluarga, kurangnya motivasi dan semangat belajar dari lingkungan sekolah, serta pergaulan teman sebaya yang negatif (Basri, 2015).

Tawuran kerap terjadi di kawasan perkotaan yang padat penduduk di mana persaingan untuk sumber daya dan dominasi sosial menjadi faktor utama pemicunya (Putri dan Warka, 2023). Tingginya tingkat kemiskinan, ketidaksetaraan ekonomi, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang layak menjadi latar belakang bagi kerentanan ini. Dampaknya tidak cuma terbatas pada korban langsung, namun juga menciptakan rasa takut dan ketidakstabilan di tengah masyarakat. Fenomena tawuran di Daerah Khusus Ibukota Jakarta seringkali melibatkan pelajar dan kadang-kadang melibatkan kelompok preman. Tawuran ini kerap dimulai dari penggunaan media sosial yang tidak bertanggung jawab di mana hal ini bisa memicu emosi dan mengundang kemarahan dari kelompok lain sehingga menyebabkan konflik fisik. Kejadian tawuran di Daerah Khusus Ibukota Jakarta menarik untuk

dianalisis karena seringkali berujung pada korban jiwa. Sebagai contoh saja peristiwa tawuran pada tanggal 5 Maret 2024 di Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan yang menyebabkan sebuah tragedi yang merenggut nyawa seorang pemuda berusia 23 tahun dengan inisial RS menjadi korban fatal dalam insiden tersebut setelah diserang dengan senjata tajam. Tawuran kerap dipicu karena adanya kesalahpahaman dan kurangnya komunikasi antar kelompok (Aulia, 2021).

Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023, terungkap bahwa Jakarta Barat menjadi wilayah yang menyandang predikat terbesarnya kasus keributan. Pada 2023 tercatat sebanyak 68 kali peristiwa tawuran di Jakarta Barat, sementara di Jakarta Pusat terjadi 44 kali, 39 kali di Jakarta Utara, 35 kali di Jakarta Selatan, dan 27 kali di Jakarta Timur. Statistik dari BPS ini mengindikasikan bahwa Jakarta Barat berada di posisi tertinggi dalam hal insiden perkelahian di antara kota-kota yang berada di bawah administrasi DKI Jakarta pada tahun 2023. Secara garis besar, tingginya angka keributan di Jakarta Barat disebabkan oleh dugaan perbedaan pendapat di antara warganya, baik perbedaan tujuan maupun karakter setiap individu, sehingga berujung pada sikap balas dendam antarkelompok masyarakat (Sujarwo & Solikha, 2019). Beberapa waktu lalu terjadi aksi tawuran yang dilakukan oleh sekelompok remaja di Jalan Haji Sali RW 006 Gang Pandan, Kelurahan Kemanggisan, Jakarta Barat. Tawuran itu tak lepas dari konflik kekerasan akibat munculnya sikap bermusuhan dari para remaja yang terlibat. Kasus keributan pelajar sering terjadi di wilayah Jakarta Barat. Hal ini menandakan tingginya angka perkelahian di sana disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, lingkungan tempat tinggal para pelaku keributan yang rawan konflik sosial. Kedua, padatnya jumlah penduduk Jakarta Barat menjadi pemicu rentannya berbagai emosi. Ketiga, sebagian besar warga di situ berasal dari keluarga berpenghasilan menengah ke bawah. Keempat, banyaknya remaja yang mengonsumsi narkoba akibat lingkungan yang longgar dan negatif (Nurhasanah, 2020).

Salah satu langkah strategis untuk mencegah terjadinya tawuran massal adalah dengan meningkatkan frekuensi kehadiran aparat kepolisian di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, petugas kepolisian mampu memberikan respon yang cepat apabila muncul gejala awal terjadinya konflik serta segera mengambil tindakan untuk mencegah eskalasi permusuhan agar tidak berakibat fatal (Abas, 2021). Dalam menjalankan roda operasional, kepolisian melaksanakan tiga pendekatan yang berbeda agar tercipta ketertiban di tengah masyarakat. Pendekatan pertama adalah pendekatan preventif dini dimana upaya ini dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor pemicu kejahatan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman gangguan ketertiban umum. Pendekatan preventif dini dijalankan Polri dengan memberikan sosialisasi, pendidikan, serta pengawasan untuk mengurangi niat negatif pelaku dan mencegah potensi gangguan keamanan. Pendekatan kedua adalah pendekatan preventif yang bertujuan untuk memelihara ketertiban dengan mengurangi kesempatan bagi individu berpotensi melakukan pelanggaran hukum. Polri meningkatkan intensitas kehadiran petugas di daerah rawan kejahatan, melakukan patroli berkala, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk memberikan rasa aman. Pendekatan terakhir adalah pendekatan represif dengan melakukan penegakan hukum untuk menjaga stabilitas ketertiban umum dengan menindak pelaku kejahatan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku (Boehari, 2021).

Salah satu pendekatan yang ditempuh Polri dalam menanggapi fenomena sering terjadinya tawuran massal adalah pendekatan preventif dengan melaksanakan kegiatan patroli rutin. Patroli ini dijalankan oleh Unit Sabhara (Samapta Bhayangkara) dengan fokus utama untuk mencegah terjadinya kejahatan dan mempertahankan ketertiban di lingkungan masyarakat. Patroli dilaksanakan oleh dua orang atau lebih personel kepolisian yang meninjau, menyelidiki, mengamati, serta memantau situasi-situasi yang berpotensi memicu terjadinya

pelanggaran hukum atau tindak pidana. Tujuannya adalah untuk mencegah kesempatan bagi pelaku kejahatan dengan mengurangi kemungkinan mereka menemukan celah untuk melakukan aksi kriminal. Dengan kehadiran yang terlihat, pelaku kejahatan cenderung menahan diri atau kesulitan dalam mencari peluang untuk melakukan kejahatan (Candra, 2020).

Patroli juga dimaksudkan untuk mencegah gangguan terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat. Dengan kehadiran polisi yang secara aktif melakukan patroli, masyarakat merasa lebih aman dan terjaga, namun demikian patroli juga berarti interaksi langsung antara aparat dengan warga. Polisi dapat berinteraksi dengan masyarakat, memberikan penjelasan, memberikan saran, serta memberikan perlindungan secara langsung. Dengan melakukan patroli, polisi dapat membangun kemitraan yang baik dengan masyarakat dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban. Polisi dapat menerima informasi dari masyarakat tentang potensi gangguan kamtibmas, menerima laporan mengenai kejadian penting, dan bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman (Setiadi, 2023).

Dalam membangun kemitraan dengan masyarakat, Polri perlu menerapkan strategi khusus untuk menangani berbagai konflik sosial yang sederhana maupun kompleks. Selain itu, Polri juga perlu melibatkan masyarakat sebagai mitra yang setara untuk menambah kekuatan personel Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar kamtibmas dapat berlangsung secara efektif dan efisien serta dapat membentuk citra Polri yang positif. Adapun bentuk keterlibatan masyarakat sebagai mitra dengan Polri yaitu melalui pembentukan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM). Penerapan FKPM ini dibentuk dengan memprioritaskan pendekatan proaktif untuk menangani berbagai konflik sosial yang dapat mengganggu kamtibmas serta untuk meningkatkan kekuatan sumber daya menjadi bersifat ganda antara Polri dan masyarakat. Proses kemitraan antara Polri dan masyarakat dapat dijalin melalui mekanisme kemitraan mulai dari proses perencanaan, pengawasan, pengendalian, serta analisis dan evaluasi pelaksanaan. Dengan adanya proses manajemen kemitraan tersebut, maka tindakan kriminalitas seperti tawuran dapat segera dicegah dan dituntaskan secara efektif, efisien, dan optimal dengan mengupayakan berbagai strategi khusus yang dibentuk Polri (Himawati, 2017).

Polda Metro Jaya memiliki tanggung jawab besar menjaga ketertiban di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sekitarnya. Organisasi kepolisian ini berada di bawah Komando Daerah Kepolisian (Komdak) Metro Jaya dan bertujuan menyelesaikan kasus-kasus penting seperti tawuran massal. Untuk mencegah kerusuhan lebih lanjut, Polda Metro Jaya memperkenalkan kelompok patroli bernama Patroli Perintis Presisi. Patroli ini awalnya dikembangkan khusus oleh Polda Metro Jaya, namun kini telah diterapkan di seluruh kepolisian regional di Tanah Air melalui program Baharkam Polri. Strategi Patroli Perintis Presisi menitikberatkan penggunaan teknik dan taktik terukur agar operasi kepolisian menjadi lebih efisien dan berdampak. Menurut analisis Ricco pada tahun 2023, pendekatan ini membantu meningkatkan efektivitas pekerjaan para personel keamanan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anugrah (2023) serta timnya telah menunjukkan hasil penting bahwa menurut *broken window theory*, penurunan tingkat kejahatan yang tersurat dalam laporan grafik Polisi Kota Tangerang adalah akibat dari kerja sama yang solid yang dilakukan antara kepolisian dan masyarakat untuk peduli terhadap segala bentuk keamanan warga tanpa memperhatikan seberapa kecil gangguan atau tindakan kriminal bahkan pada tingkat mikro. Teori *broken window* menawarkan pandangan yang jelas, masuk akal, dan meyakinkan bagi polisi dan warga untuk memahami cara terbaik mengatasi tingkat kejahatan dan ketidakberesan yang meningkat di daerah mereka. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Pramaswati dan rekan-rekan (2023) menemukan bahwa pihak sekolah telah

berhasil menerapkan upaya preventif dan represif untuk mencegah tawuran antar siswa di Kabupaten Magelang, terutama di SMA Negeri 1 Salaman. Upaya preventif yang dilakukan mencakup kerja sama antara guru BK dan Waka kesiswaan, bimbingan khusus, kolaborasi dengan orang tua, home visit, kegiatan pengasuhan, layanan klasikal kepada siswa, dan kegiatan keagamaan. Sedangkan upaya represif meliputi memberikan nasihat, teguran, hukuman ringan, panggilan orang tua, serta skorsing dan pengembalian kepada orang tua. Pihak kepolisian juga turut serta dengan melaksanakan program Police Goes to School, razia, patroli malam, razia minuman keras, dan kerja sama dengan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Penelitian ini memberikan perspektif baru dan lebih komprehensif dalam upaya pencegahan tawuran, dengan fokus khusus pada peran Patroli Perintis Presisi di wilayah metropolitan yang kompleks. Pendekatan multi-dimensi, integrasi teknologi, dan evaluasi dampak yang jelas membuat penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dan pembaruan dalam studi tentang pencegahan konflik dan pemolisian masyarakat.

Urgensi dilakukannya penelitian ini adalah sangat penting untuk dilakukan dalam rangka menghadapi tantangan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kompleks. Fenomena tawuran bukan hanya menjadi ancaman terhadap keselamatan fisik individu saja, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial dan menciptakan ketakutan di tengah masyarakat. Dengan melibatkan kepolisian dalam upaya pencegahan, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya peran dan strategi Patroli Presisi dalam menangani fenomena tawuran. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi yang besar dalam memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Berdasarkan penjabaran latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Peran Patroli Perintis Presisi Dalam Mencegah Terjadinya Tawuran di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya".

Oleh karena itu, penelitian ini mengupayakan pemahaman mendalam tentang peran patroli dalam mencegah terjadinya tawuran di DKI Jakarta, khususnya di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Sementara itu, pertanyaan-pertanyaan penelitian mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Patroli Perintis Presisi dalam mencegah terjadinya tawuran di wilayah hukum Polda Metro Jaya?
2. Strategi apa yang dapat dilakukan oleh Tim Patroli Perintis Presisi Polda Metro Jaya dalam mencegah terjadinya tindakan kriminalitas tawuran?
3. Bagaimana rumusan model kebijakan pemolisian masyarakat dalam meningkatkan pelaksanaan Patroli Perintis Presisi untuk mencegah terjadinya tawuran di wilayah hukum Polda Metro Jaya?

Tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain yaitu:

1. Untuk menganalisis peran Patroli Perintis Presisi dalam mencegah terjadinya tawuran di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
2. Untuk menganalisis strategi dapat dilakukan oleh Tim Patroli Perintis Presisi Polda Metro Jaya dalam mencegah terjadinya tindakan kriminalitas tawuran.
3. Merumuskan model model kebijakan pemolisian masyarakat dalam meningkatkan pelaksanaan Patroli Perintis Presisi untuk mencegah terjadinya tawuran di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Batasan masalah adalah parameter atau lingkup tertentu yang digunakan untuk mempersempit cakupan masalah yang sedang diteliti dalam sebuah penelitian. Batasan masalah ini membantu peneliti dalam menentukan fokus penelitian serta membatasi ruang lingkungannya agar dapat lebih terarah dan terfokus. Beberapa batasan masalah yang terdapat

dalam penelitian ini mencakup: Batasan masalah hanya pada peran Patroli Perintis Presisi dalam mencegah terjadinya tawuran tanpa melihat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat lainnya. Batasan wilayahnya adalah wilayah hukum Polda Metro Jaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif eksploratif dengan studi lapangan sebagai metode utamanya. Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada kebutuhan untuk memahami secara mendalam dan holistik fenomena Patroli Perintis Presisi dalam konteks alamiahnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai aspek terkait pelaksanaan patroli, termasuk proses, peran, tantangan, dan dampaknya terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Tipe penelitian eksploratif dipilih mengingat masih terbatasnya kajian mengenai Patroli Perintis Presisi, khususnya dalam konteks pencegahan tawuran. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh wawasan yang lebih komprehensif tentang fenomena yang diteliti dan memiliki keleluasaan untuk mengeksplorasi berbagai aspek yang mungkin relevan dengan topik penelitian.

Dalam pengumpulan data, penelitian ini mengandalkan dua jenis sumber utama: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai narasumber kunci, termasuk Direktur Samapta Polda Metro Jaya, Kasubdit Gasum Samapta Polda Metro Jaya, Danton tim Patroli Perintis Presisi, anggota Satuan Samapta Polda Metro Jaya, serta tokoh masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber dokumenter, meliputi data statistik kejahatan, laporan kegiatan patroli, regulasi terkait, hasil penelitian terdahulu, serta artikel berita yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam dan studi dokumen. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, memungkinkan fleksibilitas dalam menggali informasi lebih lanjut dari narasumber. Sementara itu, studi dokumen dilakukan untuk memberikan konteks dan data pendukung bagi analisis yang lebih komprehensif.

Analisis data dalam penelitian ini mengikuti model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses analisis ini berlangsung secara siklis dan interaktif selama penelitian berlangsung, memungkinkan peneliti untuk terus menerus memperdalam pemahaman terhadap data yang diperoleh.

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menerapkan metode triangulasi, khususnya triangulasi sumber. Metode ini melibatkan perbandingan dan pengecekan ulang informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan melalui berbagai metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, membandingkan pernyataan publik dengan pernyataan pribadi narasumber, serta membandingkan perspektif berbagai pihak yang terlibat dalam penelitian.

Melalui penerapan metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai peran Patroli Perintis Presisi dalam upaya pencegahan tawuran di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan strategi dan model kebijakan yang efektif untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu kepolisian dan manajemen keamanan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Patroli Perintis Presisi dalam Mencegah Terjadinya Tawuran di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya

Patroli Perintis Presisi memainkan peran yang sangat signifikan dalam upaya pencegahan tawuran di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Peran ini termanifestasi dalam beberapa aspek utama yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain.

Pertama, Patroli Perintis Presisi berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Kompol Li Sutasman, S.H., M.H., selaku Kasubdit Gasum Samapta Polda Metro Jaya, "Tim Patroli Perintis Presisi adalah garda terdepan dalam upaya preventif dan responsif terhadap gangguan keamanan di masyarakat. Mereka bertugas melakukan patroli rutin, merespons laporan dari masyarakat, dan menjaga situasi kondusif di wilayah Polda Metro Jaya."

Pernyataan ini menegaskan bahwa Patroli Perintis Presisi tidak hanya berfungsi sebagai unit reaktif, tetapi juga proaktif dalam mencegah terjadinya gangguan keamanan, termasuk tawuran. Kehadiran tim patroli yang rutin dan terlihat di wilayah-wilayah rawan konflik memberikan efek pencegahan yang signifikan.

Kedua, Patroli Perintis Presisi berperan dalam membangun kepercayaan dan kerjasama dengan masyarakat. Hal ini tercermin dari pernyataan Edi Susanto, Ketua RW 010 Kelurahan Kapuk Jakarta Barat, yang menyatakan, "Saya melihat peran Tim Patroli Perintis Presisi sangat signifikan dalam menjaga keamanan lingkungan kami. Mereka melakukan patroli rutin dan merespons cepat laporan dari warga."

Pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat ini memungkinkan tim patroli untuk memperoleh informasi yang lebih akurat tentang potensi konflik dan membangun sistem peringatan dini yang efektif.

Ketiga, Patroli Perintis Presisi berperan dalam memberikan respon cepat terhadap situasi yang berpotensi menimbulkan tawuran. Seperti yang disampaikan oleh Briptu Ahmad Farhan Haryo Seno, anggota Tim I Patroli Perintis Presisi Polda Metro Jaya, "Tugas utama saya adalah melakukan patroli rutin di wilayah yang telah ditentukan untuk mencegah dan menangani potensi gangguan keamanan. Kami juga bertugas untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dan merespons cepat jika ada laporan dari warga."

Kemampuan untuk merespons dengan cepat dan tepat terhadap situasi yang berpotensi memicu tawuran merupakan elemen kunci dalam mencegah eskalasi konflik.

Keempat, Patroli Perintis Presisi berperan dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi terkait potensi tawuran. Melalui interaksi rutin dengan masyarakat dan pengamatan langsung di lapangan, tim patroli dapat mengidentifikasi pola-pola dan tren yang berkaitan dengan tawuran. Informasi ini kemudian dapat digunakan untuk merumuskan strategi pencegahan yang lebih efektif.

Kelima, Patroli Perintis Presisi berperan dalam melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya tawuran dan pentingnya menjaga keamanan lingkungan. Melalui interaksi langsung dengan warga selama patroli, tim dapat menyampaikan pesan-pesan kamtibmas dan membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya mencegah tawuran.

Efektivitas peran Patroli Perintis Presisi dalam mencegah tawuran didukung oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah pelatihan khusus yang diterima oleh anggota tim. Seperti yang diungkapkan oleh Kombes Polisi Ahmad Zaenuddin, Direktur Samapta Polda Metro Jaya, "Kapolda Metro Jaya secara resmi membuka pelatihan Tim Patroli Perintis Presisi di SPN Polda Metro Jaya, Lido, Bogor, Jawa Barat. Pelatihan ini dilakukan setelah Fadil Imran menertibkan tim-tim besutan Polres yang terkesan terpisah dan bergerak sendiri."

Pelatihan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari teknik patroli, penanganan konflik, hingga komunikasi efektif dengan masyarakat. Hal ini memastikan bahwa anggota tim memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka secara efektif.

Faktor lain yang mendukung efektivitas Patroli Perintis Presisi adalah penggunaan teknologi modern. Bripda Abi Krisnawan Santoso, Anggota Tim II Patroli Perintis Presisi Polda Metro Jaya, menyatakan, "Kami menggunakan berbagai alat dan teknologi, termasuk kendaraan patroli khusus, perangkat komunikasi radio yang terintegrasi, dan aplikasi pelaporan yang memungkinkan respons cepat terhadap laporan masyarakat".

Penggunaan teknologi ini meningkatkan efisiensi operasional tim patroli dan memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap situasi yang berpotensi menimbulkan tawuran. Namun, peran Patroli Perintis Presisi dalam mencegah tawuran juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah luasnya wilayah yang harus diawasi dan kompleksitas faktor-faktor yang memicu tawuran. Untuk mengatasi hal ini, tim patroli perlu terus meningkatkan koordinasi dengan unit-unit lain di kepolisian serta dengan berbagai pemangku kepentingan di masyarakat.

B. Strategi Tim Patroli Perintis Presisi Polda Metro Jaya dalam Mencegah Terjadinya Tindakan Kriminalitas Tawuran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tim Patroli Perintis Presisi Polda Metro Jaya menerapkan berbagai strategi yang komprehensif dan terintegrasi dalam upaya mencegah terjadinya tawuran. Strategi-strategi ini dapat dikategorikan menjadi tiga pendekatan utama: preemtif, preventif, dan represif yang bersifat investigatif.

Strategi preemtif yang diterapkan oleh Tim Patroli Perintis Presisi berfokus pada upaya menghilangkan niat pelaku untuk melakukan tawuran. Kombes Polisi Ahmad Zaenuddin menjelaskan, "Polda Metro Jaya mengambil langkah proaktif dengan melaksanakan patroli yang bertujuan untuk mencegah dan mengantisipasi kejahatan jalanan yang dapat mengancam keselamatan warga serta merusak ketenangan wilayah hukum Polda Metro Jaya".

Langkah proaktif ini meliputi pelaksanaan patroli rutin dua kali sehari, yaitu pada pagi dan malam hari, dengan fokus pada wilayah-wilayah yang telah diidentifikasi sebagai rawan tawuran. Strategi ini juga melibatkan pendekatan kepada kelompok-kelompok yang berpotensi terlibat dalam tawuran, serta program edukasi dan sosialisasi tentang bahaya tawuran dan pentingnya menjaga keamanan lingkungan.

Strategi preventif yang diterapkan bertujuan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya tawuran. Salah satu langkah kunci dalam strategi ini adalah pembentukan Tim Patroli 3P (Patroli Kota, Patroli Monitoring, serta Patroli Unit K9 dan Polwan). Kopol Li Sutasman, S.H., M.H. menjelaskan, "Kami dari Turjawali Subdit Gasum Dit Samapta Polda Metro Jaya melaksanakan Patroli di beberapa titik di wilayah hukum Polda Metro Jaya untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat di bulan Ramadhan serta kami membagikan makanan untuk sahur dan takjil, patroli ini untuk mencegah adanya balap liar, tawuran dan lain-lain."

Strategi preventif ini juga melibatkan pemetaan lokasi patroli yang lebih terstruktur, dengan fokus pada zona-zona yang telah diidentifikasi sebagai rawan tawuran. Selain itu, tim patroli juga memanfaatkan teknologi seperti CCTV dan aplikasi pelaporan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan respons terhadap potensi tawuran.

Strategi represif yang bersifat investigatif diterapkan ketika tawuran telah terjadi atau ada indikasi kuat akan terjadinya tawuran. Kombes Polisi Ahmad Zaenuddin menjelaskan, "Dengan pendekatan yang presisi dan terencana yang tidak hanya fokus pada pencegahan balap liar dan tawuran, tetapi juga pada kejahatan lainnya yang dapat terjadi di jalanan. Dari

pelaksanaan patroli 3P yang presisi dan terencana di beberapa titik, kami dari pihak Polda Metro Jaya telah berhasil menangkap pelaku tawuran yang berjumlah tujuh orang pemuda di Kembangan."

Strategi ini melibatkan tindakan cepat untuk menghentikan tawuran yang sedang berlangsung, mengamankan pelaku, dan melakukan investigasi untuk mengungkap akar masalah dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Langkah-langkah yang diambil termasuk mobilisasi cepat aparat keamanan ke lokasi, pemisahan pihak-pihak yang bertikai, dan penahanan para pelaku utama untuk proses hukum lebih lanjut. Setelah itu, dilakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap motif di balik tawuran, yang hasilnya akan digunakan untuk merancang dan menerapkan program pencegahan jangka panjang, seperti mediasi antar kelompok dan pendidikan perdamaian.

Efektivitas strategi-strategi ini didukung oleh beberapa faktor kunci. Pertama, adanya koordinasi yang baik antar unit di dalam Polda Metro Jaya. Kedua, penggunaan teknologi modern yang memungkinkan pemantauan dan respons yang lebih efektif. Ketiga, pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemecahan masalah, bukan hanya penegakan hukum semata.

Namun, implementasi strategi-strategi ini juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah kompleksitas faktor-faktor yang memicu tawuran, yang seringkali berakar pada masalah sosial ekonomi yang lebih luas. Selain itu, luasnya wilayah yang harus diawasi juga menjadi tantangan tersendiri bagi tim patroli.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, Tim Patroli Perintis Presisi terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan strategi. Salah satu langkah yang diambil adalah meningkatkan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan. Hal ini sejalan dengan konsep pemolisian masyarakat yang menekankan pentingnya kerjasama antara polisi dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

C. Model Kebijakan Pemolisian Masyarakat dalam Meningkatkan Pelaksanaan Patroli Perintis Presisi untuk Mencegah Terjadinya Tawuran

Model kebijakan pemolisian masyarakat yang diterapkan oleh Tim Patroli Perintis Presisi Polda Metro Jaya dalam upaya mencegah tawuran mencakup empat proses manajemen utama: komunikasi dan koordinasi, kerjasama, penanganan, serta evaluasi kinerja. Proses komunikasi dan koordinasi melibatkan interaksi aktif dengan masyarakat dan instansi terkait, sementara kerjasama diwujudkan melalui program-program bersama seperti forum diskusi rutin dan pelatihan resolusi konflik untuk memperkuat kohesi sosial. Penanganan meliputi respons cepat terhadap indikasi awal tawuran dan mediasi konflik, diikuti dengan evaluasi kinerja berkala untuk mengukur efektivitas strategi dan melakukan penyesuaian yang diperlukan.

Dalam aspek komunikasi dan koordinasi, Tim Patroli Perintis Presisi menerapkan sistem komunikasi yang terintegrasi. Ipda Dennis Pratama, S.H., Ketua Tim I Patroli Perintis Presisi Polda Metro Jaya, menjelaskan, "Kami menggunakan sistem komunikasi radio yang terintegrasi, yang memungkinkan kami untuk berkoordinasi dengan cepat dengan unit-unit lain seperti reskrim dan intel."

Sistem komunikasi ini memungkinkan koordinasi yang lebih efektif, baik antar anggota tim patroli maupun dengan unit-unit lain di kepolisian. Selain itu, tim patroli juga menjalin komunikasi yang intensif dengan masyarakat. Edi Susanto, Ketua RW 010 Kelurahan Kapuk Jakarta Barat, menyatakan, "Kami memiliki nomor kontak yang bisa dihubungi kapan saja.

Selain itu, kami sering mengadakan pertemuan bulanan untuk berdiskusi mengenai keamanan lingkungan dengan mereka."

Dalam aspek kerjasama, Tim Patroli Perintis Presisi menjalin kemitraan dengan berbagai pihak. Ipda Sugiyanto, S.H., Ketua Tim II Patroli Perintis Presisi Polda Metro Jaya, menjelaskan, "Sejauh ini sudah bekerjasama dengan Unit Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jakarta Selatan dan unit Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Jakarta Selatan. Selain itu juga tim berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), komunitas motor, atau organisasi masyarakat yang memiliki kepedulian dalam memberantas kejahatan dan kenakalan remaja di masing-masing wilayah."

Kerjasama ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pertukaran informasi, pelaksanaan program bersama, hingga penanganan kasus-kasus tertentu yang memerlukan keahlian khusus.

Dalam aspek penanganan, Tim Patroli Perintis Presisi menerapkan pendekatan yang berbeda-beda tergantung pada karakteristik kasus yang dihadapi. Ipda Sugiyanto, S.H. menjelaskan, "Pasti ada pemetaannya, karena sesuai pada UU yang mengatur tentang orang dewasa dengan remaja, jika ditemui adanya tawuran yang dilakukan oleh remaja di bawah umur, maka tim hanya perlu mengamankan para pelaku yang ditangkap saja, kemudian dari tim Patroli Perintis Presisi Polda Metro Jaya akan antar ke Polres terdekat buat dihubungi orang tua pelaku."

Pendekatan ini mencerminkan pemahaman bahwa tawuran, terutama yang melibatkan remaja, memerlukan penanganan yang tidak hanya bersifat punitif, tetapi juga rehabilitatif dan edukatif. Strategi punitif seperti penindakan hukum tetap diterapkan untuk memberikan efek jera, namun pendekatan rehabilitatif menjadi fokus utama melalui program konseling, terapi kelompok, dan pelatihan manajemen emosi untuk membantu para pelaku memahami akar masalah dan mengembangkan keterampilan resolusi konflik yang lebih baik.

Dalam aspek evaluasi kinerja, Tim Patroli Perintis Presisi melakukan penilaian secara berkala terhadap efektivitas kinerja mereka. Kopol Li Sutasman, S.H., M.H. menjelaskan, "Kinerja kami dievaluasi secara berkala berdasarkan laporan kegiatan, feedback dari masyarakat, dan penilaian dari atasan langsung. Selain itu juga dievaluasi dari hasil analisis data kejahatan."

Proses evaluasi ini tidak hanya berfokus pada aspek kuantitatif seperti jumlah patroli yang dilakukan atau jumlah kasus yang ditangani, tetapi juga mempertimbangkan aspek kualitatif seperti persepsi masyarakat terhadap keamanan lingkungan dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.

Model kebijakan pemolisian masyarakat yang diterapkan oleh Tim Patroli Perintis Presisi ini menunjukkan keselarasan dengan konsep *community policing* yang menekankan pada kemitraan antara polisi dan masyarakat dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban. Pendekatan ini memungkinkan Tim Patroli Perintis Presisi untuk tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah tawuran.

Efektivitas model kebijakan ini tercermin dari penurunan angka kejahatan, termasuk tawuran, di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Edi Susanto, Ketua RW 010 Kelurahan Kapuk Jakarta Barat, menyatakan, "Sejak kehadiran mereka, kami melihat penurunan yang signifikan dalam kasus pencurian dan tindak kriminal lainnya."

Namun, implementasi model kebijakan ini juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah kebutuhan untuk terus memperbarui pendekatan sesuai dengan dinamika sosial yang terus berubah. Bripda Abi Krisnawan Santoso, Anggota Tim II Patroli Perintis Presisi Polda Metro Jaya, mengungkapkan, "Kami berencana untuk mengembangkan sistem teknologi

informasi yang lebih canggih untuk pemantauan dan pelaporan. Selain itu, kami akan meningkatkan pelatihan anggota tim dan memperkuat kolaborasi dengan komunitas lokal."

Tantangan lain adalah memastikan keberlanjutan dan konsistensi dalam penerapan model kebijakan ini. Hal ini memerlukan komitmen jangka panjang, tidak hanya dari pihak kepolisian, tetapi juga dari berbagai pemangku kepentingan di masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas model kebijakan pemolisian masyarakat dalam konteks Patroli Perintis Presisi:

1. Peningkatan kapasitas personel: Perlu adanya pelatihan berkelanjutan bagi anggota Tim Patroli Perintis Presisi, tidak hanya dalam hal teknis patroli, tetapi juga dalam hal komunikasi efektif, resolusi konflik, dan pemahaman dinamika sosial masyarakat.
2. Pemanfaatan teknologi: Pengembangan dan implementasi sistem teknologi informasi yang lebih canggih dapat meningkatkan efektivitas pemantauan dan respons terhadap potensi tawuran.
3. Penguatan kemitraan: Perlu adanya penguatan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat, dalam upaya pencegahan tawuran yang lebih komprehensif.
4. Pendekatan berbasis data: Pemanfaatan analisis data yang lebih mendalam dapat membantu dalam mengidentifikasi pola dan tren terkait tawuran, sehingga memungkinkan tindakan pencegahan yang lebih terarah.
5. Evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan: Perlu adanya mekanisme evaluasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa model kebijakan yang diterapkan tetap relevan dan efektif dalam menghadapi dinamika sosial yang terus berubah.

Model kebijakan pemolisian masyarakat yang diterapkan oleh Tim Patroli Perintis Presisi Polda Metro Jaya dalam upaya mencegah tawuran menunjukkan pendekatan yang komprehensif dan berorientasi pada kemitraan dengan masyarakat. Model ini mencakup aspek komunikasi dan koordinasi yang efektif, kerjasama yang luas dengan berbagai pihak, pendekatan penanganan yang bersifat rehabilitatif dan edukatif, serta evaluasi kinerja yang berkelanjutan.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, model kebijakan ini telah menunjukkan efektivitas dalam menurunkan angka kejahatan, termasuk tawuran, di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Namun, untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan efektivitas, diperlukan komitmen jangka panjang dan penyesuaian berkelanjutan sesuai dengan dinamika sosial yang terus berubah.

Model kebijakan pemolisian masyarakat yang diterapkan oleh Tim Patroli Perintis Presisi ini dapat menjadi contoh baik (best practice) bagi upaya pencegahan tawuran dan peningkatan keamanan masyarakat di wilayah lain. Namun, perlu diingat bahwa setiap wilayah memiliki karakteristik dan tantangan yang unik, sehingga penerapan model ini di wilayah lain perlu mempertimbangkan konteks lokal dan melakukan penyesuaian yang diperlukan.

Akhirnya, keberhasilan upaya pencegahan tawuran tidak hanya bergantung pada kepolisian semata, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, model kebijakan pemolisian masyarakat yang diterapkan oleh Tim Patroli Perintis Presisi ini perlu terus dikembangkan dan diperkuat, dengan tetap menjaga prinsip kemitraan antara polisi dan masyarakat sebagai landasan utamanya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dan dianalisis secara mendalam, dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran Patroli Perintis Presisi: Patroli Perintis Presisi berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Perannya mencakup melakukan patroli rutin, merespons laporan dari masyarakat, menjaga situasi agar tetap kondusif, serta menjalankan upaya preventif dan responsif untuk mencegah tawuran. Tim ini juga membangun kepercayaan dan kerjasama dengan masyarakat, mengumpulkan informasi terkait potensi konflik, serta melakukan edukasi kepada warga tentang pentingnya menjaga keamanan lingkungan.
2. Strategi Tim Patroli Perintis Presisi: Strategi yang dilakukan oleh Tim Patroli Perintis Presisi meliputi pendekatan preemtif, preventif, dan represif. Pendekatan preemtif bertujuan untuk menghilangkan niat pelaku tawuran, sedangkan pendekatan preventif bertujuan mengurangi kesempatan terjadinya tawuran dengan meningkatkan kehadiran patroli di wilayah rawan. Pendekatan represif diterapkan saat tawuran sudah terjadi dengan fokus pada investigasi dan penegakan hukum yang cepat serta efektif.
3. Model Kebijakan Pemolisian Masyarakat: Model kebijakan pemolisian masyarakat yang diterapkan dalam meningkatkan pelaksanaan Patroli Perintis Presisi mencakup empat proses manajemen utama: komunikasi dan koordinasi, kerjasama, penanganan, serta evaluasi kinerja. Pendekatan ini menekankan kemitraan antara polisi dan masyarakat serta orientasi pada pemecahan masalah, yang terbukti efektif dalam menurunkan angka tawuran di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas Patroli Perintis Presisi mencakup peningkatan frekuensi patroli di zona rawan, pemanfaatan teknologi informasi untuk pemantauan, serta pengembangan program pelatihan berkelanjutan bagi anggota tim. Dengan mengimplementasi rekomendasi tersebut, diharapkan Patroli Perintis Presisi dapat semakin meningkatkan efektivitasnya dalam mencegah tawuran dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Upaya ini tidak hanya akan mengurangi insiden tawuran, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan melalui lingkungan yang lebih aman dan kondusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, M. (2021). Upaya Penanggulangan Terjadinya Tawuran Antar Pelajar (Studi Kasus Di Kabupaten Karawang). *Prosiding Konferensi Nasional Penelitian Dan Pengabdian Universitas Buana Perjuangan Karawang*, 1(1), 1173-1190.
- Alim, F. Y. (2020). Efektivitas Prinsip Perpolisian Masyarakat (POLMAS) di Kelurahan Bonesompe Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 13(1), 32-51.
- Amallia, N. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Sistem Keamanan Lingkungan Untuk Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 2(1), 1-9.
- Anugrah, B. (2023). Analisis Patroli Perintis Presisi Polres Metro Tangerang Kota Menggunakan Broken Window Theory. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17(3), 15.
- Arisca, F., & Lubis, A. Y. (2022). Strategi Pemolisian dalam Pencegahan Konflik Tawuran Antar Warga oleh Polres Metro Jakarta Selatan. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 16(2), 94-109.
- Aryawan, I. W. (2021). Penerapan Kepemimpinan Asta Brata dalam Pendidikan dari Sudut Pandang Teori Konflik. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(1), 56-66.
- Aulia, M. A. N. (2021). Optimalisasi Polmas Guna Mencegah Tawuran Antar Warga. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 15(2), 9.
- Basri, A. (2015). Fenomena Tawuran Antar Pelajar dan Intervensinya. *Hisbah: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 12(1), 1-25.
- Bintoro, J. S. (2007). Peningkatan Status Polresta Menjadi Poltabes Sebagai Upaya Strategis Pengembangan Institusi Kepolisian Kota Surakarta.
- Boehari, A. (2021). Peran Kepolisian Dalam Mengatasi Tawuran Pelajar (Studi Kasus di SMK PGRI 1 Kota Serang). *Jurnal Pelita Bumi Pertiwi*, 2(02), 28-40.
- BPS. (2023). Statistik Kriminal 2023. Retrieved from <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/12/5edba2b0fe5429a0f232c736/statistik-kriminal-2023.html>, diakses pada 27 Maret 2024.
- Bungin, B. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer.
- Burhanuddin, H. (2017). Efektifitas Pelaksanaan Patroli Terpadu Dalam Upaya Menekan Tingkat Kriminalitas (Pada Polres Bungo). *Serambi Hukum*, 11(01), 56-68.
- Candra, A. (2020). Patroli Merupakan Pencegahan Dan Penindakan. *Majalah Keadilan*, 20(2), 31-38.
- Clarke, R. V. (1980). Situational Crime Prevention: Theory And Practice. *Brit. J. Criminology*, 20, 136.
- Clarke, R. V. (1995). Situational Crime Prevention. *Crime And Justice*, 19, 91-150.
- Daradjat, R. S. (2015). Sosialisasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Oleh Polisi Resort Kota Dalam Membentuk Sikap Masyarakat. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 3(2), 154-172.
- Dermawan, M. K. (2001). Pencegahan Kejahatan: Dari Sebab-Sebab Kejahatan Menuju Pada Konteks Kejahatan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 1(3).
- Durkheim, E. (1973). *Emile Durkheim On Morality And Society*. University Of Chicago Press.
- Elita, R. L. N., Guntara, D., Abas, M., & Targana, T. (2023). Upaya Penegakan Hukum Kepolisian Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Kasus Wilayah Hukum Kabupaten Karawang). *UNES Law Review*, 6(1), 2402-2409.
- Fatimah, F. N. A. D. (2016). Teknik Analisis SWOT. *Anak Hebat Indonesia*.

- Ginting, R. Z., & Sembiring, T. B. (2024). Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindakan Pembegalan di Kota Binjai (Police's Efforts in Handling Burglary in Binjai City). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 6897-6904.
- Haerani, R. (2021). Tindakan Preventif Penanggulangan Kejahatan di Masyarakat Melalui Patroli Polisi (Studi Polda NTB). *Unizar Law Review (ULR)*, 4(1).
- Hidayatullah, K. S. (2020). 65 Kultum Kamtibmas. Deepublish.
- Himawati, N., Adkha, T., Fatomi, A., & Taufiqurrahman, H. (2017). Pembentukan forum kemitraan polisi dan masyarakat sebagai upaya reduksi gejala gangguan kamtibmas. *URECOL*, 255-260.
- Huntington, S. P. (1983). *Tertib Politik di Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah Buku II*.
- Ichwanul, M. (2022). Analisis Viktimologi Pada Fenomena Tawuran Kelompok Anak Remaja di DKI Jakarta. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 11775-11783.
- Ismail, I., Salmon, I. P., Haryanto, H., Rahmat, I., Aziz, M. H., Prawoto, E. R., & Setiadji, A. (2022). *Pemolisian Masyarakat Di Era Demokrasi*.
- Isnawan, F. (2023). Kajian Kriminologis Fenomena Tawuran Remaja Di Indonesia Dan Penanggulangannya. *Gorontalo Law Review*, 6(1), 62-74.
- Jurnal
- Kanitero, D. Y. (2021). Strategi Keamanan Dalam Pencegahan Konflik Pertanahan Di Wilayah Hukum Polres Kota Tangerang (Studi Kasus Konflik Pertanahan antara Haji Sobari dan Merna Siriyanti). *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, 4(2), 83-97.
- Kartono, K. (1998). *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*.
- Katz, D., & Kahn, R. (2015). *The Social Psychology Of Organizations*. In *Organizational Behavior 2* (pp. 152-168). Routledge.
- Kharismandita, B. (2023). *Patroli Polisi Dalam Mencegah Kejahatan di Jalanan* (Doctoral dissertation, Universitas Bhayangkara Surabaya).
- Lodang, M. F. I., Dima, A. D., & Kian, D. A. (2024). Analisis Peran Kepolisian Resor Sikka dalam Mengurangi Kasus Pencurian Kendaraan Roda Dua di Kota Maumere. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 2(2), 255-273.
- Mansoer, W. (2000). *Student Involvement In Tawuran: A Social-Psychological Interpretation Of Intergroup Fighting Among Male High School Students In Jakarta*.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Sage.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*.
- Muhadjir, N. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Musihono, N. (2006). *Profesionalisme Polri dalam Mewujudkan Kamtibmas Pasca Pemberlakuan UU No. 2 Tahun 2002: Studi di Kabupaten Madiun* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Mustofa, M. (1998). *Perkelahian Massal Pelajar Antar Sekolah di Jakarta Selatan, Sebuah Studi Kasus Berganda: Rekonstruksi Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme*. Universitas Indonesia, Depok.
- Naufal, M. (2019). *Kebijakan Publik Dan Konflik Sosial (Implementasi Kebijakan Penanganan Tawuran Di Manggarai Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial)* (Bachelor's thesis, FISIP UIN Jakarta).
- Nisak, Z. (2013). Analisis SWOT Untuk Menentukan Strategi Kompetitif. *Jurnal Ekbis*, 9(2), 468-476.

- Paramaswasti, Y. B., Mediatati, N., & Nugraha, A. B. (2023). Upaya Preventif dan Represif Pihak Kepolisian dan Sekolah dalam Mengatasi Tawuran Antar Pelajar. *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(7), 5291-5300.
- Pratama, R. R. (2017). Upaya Patroli Dialogis Unit Patroli Satuan Sabhara dalam Mencegah Tindak Pidana Curanmor di Wilayah Hukum Polres Cilacap. *Advances in Police Science Research Journal*, 1(1), 245-292.
- Pulungan, M. S. H. (2015). Analisis Hukum Terhadap Peranan Patroli Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Kejahatan (Studi Pada Polres Serdang Bedagai) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Purwanti, A., Pranawa, B., & Purwadi, P. (2021). Deteksi Dini Oleh Intelijen Polri Dalam Mengantisipasi Gangguan Kamtibmas Pada Pilkada Di Boyolali. *Jurnal Bedah Hukum*, 5(1), 1-13.
- Putri, S. I., & Warka, M. (2023). Tawuran Lintas Pelajar Ditinjau Dari Kriminologi. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 2240-2266.
- Ramadhan, R., Mulyadi, M., & Marzuki, M. (2021). Peran Polisi Masyarakat (Polmas) Dalam Mewujudkan Sistem Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Studi di Kepolisian Resort Tanjung Balai). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3(1), 274-291.
- Ricco, M. (2023). Analisis Efektivitas Tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Selatan dalam Penanggulangan Kejahatan Jalanan (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM).
- Rothwell, W. J., & Kazanas, H. C. (1986). Beyond Competency Models In Training And Development. *Performance+ Instruction*, 25(8), 19-21.
- Rukin, S. P. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Safii, M. H. (2024). *Pencegahan Kejahatan Konvensional*. Kaizen Media Publishing.
- Said, M. R. R. (2023). Peran Tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Selatan Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Di Jalan Raya Kota Jakarta Selatan (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Sanjaya, E. (2022). Efektivitas Patroli Polisi Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana (Studi Kasus Di Polres Labuhan Batu). (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan)
- Saputra, A. (2023). Penguatan Peran Pemolisian Masyarakat Dalam Mewujudkan Stabilitas Kamtibmas Bagi Pembangunan Nasional Tahun 2022. *Jurnal Litbang Polri*, 26(1), 1-10.
- Saputra, A. (2024). Penguatan Pemberantasan Kejahatan Jalanan dan Aksi Premanisme Tahun 2023. *Jurnal Litbang Polri*, 27(1), 44-54.
- Sarwono, S. (2014). Anak Jakarta; A Sketch Of Indonesian Youth Identity. *Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia*, 15(1), 4.
- Sennen, E. (2019). Kewaspadaan Dini Sebagai Upaya Menjaga Keamanan Masyarakat. *JIPD (Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar)*, 3(2), 84-88.
- Setiadi, M. D. (2023). Efektivitas Patroli Sebagai Tindak Pencegahan Penanggulangan Kejahatan dan Pelanggaran Studi Polres Wonosobo. *Transformasi Hukum*, 2(1), 31-40.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Sujarwo & Solikha, A. (2019). Fenomena Tawuran Antar Warga. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 18(2), 225-241.

- Sutasman, L. (2024). Wawancara tentang peran Patroli Perintis Presisi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. *Alghifari*, 09/09/2024. Kombes Polisi Ahmad Zaenuddin (Direktur Samapta Polda Metro Jaya).
- Syawallifa, R. N., & Liyanti, L. (2022). Figur Remaja Pendukung Nazi dalam Film Lore: Perkembangan Identitas Remaja dan Pergerakan Posisi Korban-Pelaku. *JENTERA: Jurnal Kajian Sastra*, 11(2), 195-211.
- Tabah, A. (1993). Patroli Polisi.
- Tadie, J. (2009). Wilayah Kekerasan di Jakarta.
- Tualeka, M. W. N. (2017). Teori konflik sosiologi klasik dan modern. *Al-Hikmah: Jurnal studi Agama-agama*, 3(1), 32-48.
- Zaenuddin, A. (2024). Wawancara tentang strategi preventif Patroli Perintis Presisi untuk mencegah tindakan kriminal. *Alghifari*, 01/09/2024.